



RENJA AKHIR 2023

**BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2022 - 2026.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Palangka Raya, 20 Mei 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Drs.H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650610 199103 1 025

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Tahun 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	6
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	8
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	10
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	13
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	13
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.....	15
3.3 Program dan Kegiatan	16
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	18
4.1 Rumusan Program dan Kegiatan serta Target Kinerja dan Pendanaan.....	18
BAB V PENUTUP	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penyusunan Renja-PD Tahun 2023

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program 2023 dan Kegiatan SKPD Tahun Prakiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan akhir dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renja SKPD memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 secara garis besar meliputi, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Selanjutnya Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari atau sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- d. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3 Maksud dan tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif tahun 2023 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk :

1. Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun sebelumnya.
4. Mensinergikan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Tahun 2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Perumusan Program dan Kegiatan serta target kinerja dan pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Adapun dasar hukum terkait tugas pokok dan fungsi BKAD diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara umum, tugas BKAD adalah Membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrumen penilaian.

Evaluasi pelaksanaan Renja BKAD dan capaian renstra sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama SKPD : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d (tahun berjalan)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
4	02	03	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
4	02	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	30 Bulan	50%
4	02	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah rata-rata pemakaian telepon, Air, Listrik dan Internet	60 Bulan	12 Bulan	4 Jenis	4 Jenis	100%	12 Bulan	30 Bulan	50%
4	02	03	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	25 Jenis	5 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	5 Jenis	13 Jenis	52%
4	02	03	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah jenis asuransi	10 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	5 Jenis	50%
4	02	03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya	137 Unit	37 Unit	2 Jenis	2 Jenis	100,00%	25 Unit	64 Unit	46,72%
4	02	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honorarium PNS dan upah non PNS	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
4	02	03	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	20 Jenis	4 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100%	4 Jenis	15 Jenis	75%
4	02	03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	60 Bulan	12 Bulan	10 Jenis	10 Jenis	100%	12 Bulan	34 Jenis	57%
4	02	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	12 Bulan	4 Jenis	4 Jenis	100%	12 Bulan	28 Jenis	47%
4	02	03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan	60 Bulan	12 Bulan	13 Komponen	13 Komponen	100%	12 Bulan	37 Jenis	62%
4	02	03	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja	20 Jenis	4 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	100%	4 Jenis	22 Jenis	110%
4	02	03	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	60 Bulan	12 Bulan	5 Lokasi	5 Lokasi	100%	12 Bulan	29 Bulan	48%
4	02	03	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan surat kabar harian	60 Bulan	12 Bulan	2 Jenis	2 Jenis	100%	12 Bulan	26 Bulan	43%

4	02	03	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan makan dan minum untuk rapat/tamu kantor	60 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
4	02	03	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
4	02	03	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
4	02	03	01	76	Penyusunan dan Penyebaran Informasi Keuangan dan Aset	Jumlah Kegiatan yang diikuti	0 Kegiatan	0 Kegiat an	1 Lapo ran	1 Laporan	100%	4 Kegiat an	5 Kegiatan	0%
4	02	03	02		PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
4	02	03	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis perlengkapan rumah dinas	25 Jenis	0 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	0%	5 Jenis	6 Jenis	24%
4	02	03	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	15 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	3 Jenis	8 Jenis	53%
4	02	03	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis pengadaan mebeleur	20 Jenis	0 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	0%	4 Jenis	6 Jenis	30%
4	02	03	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor/mess/wisma/asrama yang dipelihara	45 Gedung	9 Gedung	4 Paket	4 Paket	100,00%	9 Gedung	22 Gedung	48,89%
4	02	03	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	15 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	3 Jenis	8 Jenis	53%
4	02	03	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah kebutuhan pemeliharaan mebeleur	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
4	02	03	02	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir	Jumlah kebutuhan pemeliharaan pagar, haman dan tempat parkir	60 Bulan	12 Bulan	4 Paket	4 Paket	100%	12 Jenis	28 Jenis	47%
4	02	03	02	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah pekerjaan rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	10 Pekerja an	0 Pekerj aan	2 Pekerj aan	2 Pekerja an	0%	2 Pekerj aan	4 Pekerja an	40%
4	02	03	02	141	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah pekerjaan rehabilitasi sedang/berat gedung/mess/asrama	16 Pekerja an	0 Pekerj aan	5 Pekerj aan	5 Pekerja an	100%	4 Pekerj aan	4 Pekerja an	25%
4	02	03	05		PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
4	02	03	05	130	Bimtek/Seminar/Lokakarya/Workshop	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek/seminar/kursus/lokakarya /workshop	115 Orang	0 Orang	6 Orang	2 Orang	0%	12 Orang	14 Orang	12%
4	02	03	06		PROGRAM Peningkatan dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
4	02	03	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	20 Dokume n	4 Dokum en	4 Doku men	4 Dokume n	100%	4 Doku men	12 Dokume n	60%
4	02	03	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah buku laporan semesteran	250 Buku	50 Buku	1 Lapo ran	1 Laporan	100%	50 Buku	101 Buku	40%

4	02	03	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan semester dan laporan keuangan Badan dan Aset Keuangan Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Dokumen	6 Laporan	60%
4	02	03	06	06	Penyusunan RKA SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	23 Dokumen	7 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	15 Dokumen	65%
4	02	03	06	14	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Laporan	60%
4	02	03	06	15	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen	7 Dokumen	70%
4	02	03	06	16	Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi laporan realisasi anggaran SKPD	225 SKPD	45 SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	45 SKPD	91 SKPD	40%
4	02	03	06	33	Penyusunan Laporan TEPRA/SIMPPD	Jumlah laporan TEPRA/SIMPPD	60 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Laporan	25 Laporan	42%
4	02	03	06	67	Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi di Lingkup BKAD Prov. Kalteng	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Dokumen	3 Laporan	60%
4	02	03	17		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
4	02	03	17	01	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah buku analisa standar belanja	1000 Buku	200 Buku	1 Pergub	1 Pergub	100%	200 Buku	401 Buku	40%
4	02	03	17	02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah buku standar satuan harga barang dan jasa	1000 Buku	200 Buku	2 Laporan	2 Laporan	100%	200 Buku	402 Buku	40%
4	02	03	17	03	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi	5 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	100%	1 Pergub	3 Pergub	60%
4	02	03	17	06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD	5 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	100%	1 Perda	3 Perda	60%
4	02	03	17	07	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	5 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	100%	1 Pergub	3 Pergub	60%
4	02	03	17	08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	5 Perda	1 Perda	1 Perda	0 Perda	0%	1 Perda	2 Perda	40%
4	02	03	17	09	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	100%	1 Pergub	3 Pergub	60%
4	02	03	17	10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	100%	1 Perda	3 Perda	60%
4	02	03	17	11	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	100%	1 Pergub	3 Pergub	60%
4	02	03	17	12	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Tersedianya informasi keuangan daerah	60 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Bulan	25 Bulan	42%
4	02	03	17	16	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Tertibnya pengelolaan aset/barang milik daerah	225 SKPD	45 SKPD	45 SKPD	45 SKPD	100%	45 SKPD	135 SKPD	60%

4	02	03	17	20	Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SOPD yang terkoneksi jaringan SIMDA keuangan	225 SKPD	45 SKPD	45 SKPD	45 SKPD	100%	45 SKPD	135 SKPD	60%
4	02	03	17	27	Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah jenis laporan posisi kas daerah	15 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	11 Jenis	73%
4	02	03	17	28	Pengelolaan Gaji PNS	Terlaksananya pengelolaan gaji PNS Pemprov Kalteng	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
4	02	03	17	32	Evaluasi dan Koordinasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Gubernur tentang bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota	70 SK	4 SK	14 SK	14 SK	100%	14 SK	32 SK	46%
4	02	03	17	39	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah SOPD yang mengikuti asistensi penyusunan laporan keuangan	225 SKPD	45 SKPD	45 SKPD	45 SKPD	100%	45 SKPD	135 SKPD	60%
4	02	03	17	65	Administrasi Belanja Langsung	Terlaksananya administrasi belanja langsung	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
4	02	03	17	75	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi TAPD dalam rangka penyusunan kebijakan keuangan daerah	50 Bulan	10 Bulan	10 Bulan	10 Bulan	100%	10 Bulan	30 Bulan	60%
4	02	03	17	76	Penyusunan Pergub, NPHD dan SK PPKD	Terlaksananya administrasi belanja langsung	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	60%
4	02	03	17	78	Sosialisasi ASB & E-Budgeting	Jumlah SOPD yang mengikuti asistensi penyusunan APBD & APBD-P	141 SOPD	0 SOPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	47 SOPD	48 SOPD	34%
4	02	03	17	79	Pemeliharaan Aplikasi E-Budgeting	Jumlah aplikasi E-Budgeting yang terpeliharaan	0 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	0%
4	02	03	17	81	Sosialisasi Permendagri Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah	0 Dokumen	0 Paket	0 Dokumen	1 Dokumen	0%	1 Paket	2 Paket	0%
4	02	03	17	83	Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah aplikasi yang dikelola	0 Paket	0 Paket	0 Paket	1 Paket	0%	1 Paket	2 Paket	0%
4	02	03	18		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA									
4	02	03	18	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/kota	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	70 Raperda/Raperbup/Walikota	14 Raperda/Raperbup/Walikota	14 SK	14 SK	100%	14 Raperda/Raperbup/Walikota	42 Raperda	60%
4	02	03	18	07	Evaluasi Rancangan peraturan daerah & Rancangan Peraturan Bup/Walikota tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	70 Raperda/Raperbup/Walikota	14 Raperda/Raperbup/Walikota	14 SK	14 SK	100%	14 Raperda/Raperbup/Walikota	42 Raperda / Raperbup/Walikota	60%
4	02	03	18	09	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah	Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah	1700 Orang	300 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	350 Orang	651 Orang	38%
4	02	03	18	10	Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	70 Raperda/Raperbup/Walikota	14 Raperda/Raperbup/Walikota	14 Raperda/Raperbup/Walik	14 Raperda / Raperbup/Walikota	100%	14 Raperda/Raperbup/Walik	42 Raperda / Raperbup/Walikota	60%

								ta	ota			ota		
4	02	03	19		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/KELURAHAN									
4	02	03	19	04	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan Keuangan	Terlaksananya monitoring bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan di kabupaten/kota	70 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%	14 Kab/Kota	42 Kelurahan/Desa	60%
4	02	03	52		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET/BARANG DAERAH									
4	02	03	52	01	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah	44 Buku	20 Buku	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Buku	32 Buku	73%
4	02	03	52	09	Pengamanan Aset Milik Daerah	Terjaganya aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	60 Bulan	12 Bulan	4 Paket	4 Paket	100%	12 Bulan	28 Bulan	47%
4	02	03	52	10	Penyusunan RDKMBMD dan DKBMD	Jumlah buku daftar kebutuhan barang milik daerah Pemprov. Kalteng	1000 Buku	200 Buku	1 Laporan	1 Laporan	100%	200 Buku	401 Buku	40%
4	02	03	52	15	Penghapusan Barang Tidak Bergerak	Jumlah buku data barang tidak bergerak yang akan dihapus	500 Buku	100 Buku	15 Buku	15 Buku	100%	100 Buku	215 Buku	43%
4	02	03	52	17	Penghapusan Barang Bergerak	Jumlah buku data barang bergerak yang akan dihapus	500 Buku	100 Buku	15 Buku	15 Buku	100%	100 Buku	215 Buku	43%
4	02	03	52	18	Rekonsiliasi Pencocokan Data Pengadaan Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah laporan pengadaan barang triwulan I,II,III, dan IV	44 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	27%
4	02	03	52	19	Penyusunan Laporan Akuntansi Barang Milik Daerah	Jumlah buku laporan neraca barang milik Pemprov. Kateng	50 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	100%	10 Buku	30 Buku	60%
4	02	03	52	20	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)	Jumlah laporan inventaris barang	50 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	100%	10 Buku	30 Buku	60%
4	02	03	52	21	Penyusunan Laporan Kegiatan Proyek Selesai dan Laporan Realisasi Pengadaan Barang	Jumlah buku laporan pelaksanaan seluruh kegiatan berdasarkan anggaran yang ada dalam DPA	50 Buku	10 Buku	15 Buku	15 Buku	100%	10 Buku	35 Buku	70%
4	02	03	52	22	Pengelolaan Aset Daerah yang Dimanfaatkan	Jumlah aset milik daerah yang dikelola	29 Lokasi	1 Lokasi	2 Perhub Laporan	2 Pergub Laporan	100%	7 Lokasi	10 Lokasi	34%
4	02	03	52	29	Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah	Jumlah aplikasi yang dikelola	3 Paket	0 Paket	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	1 Paket	2 Paket	67%
4	02	03	52	31	Pengelolaan Barang Milik dAerah	Jumlah Buku Analisa dan Studi	3 Buku	0 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	2 Buku	67%
4	02	03	52	32	Pengelolaan Investasi	Jumlah Dokumen Sertifikat	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Buku	2 Buku	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dari 4 sasaran dan 5 indikator yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama (IKU).Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B	ASPEK PELAYANAN UMUM											
IV.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
3	Keuangan											
3.1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan			W T P	W T P	W T P	W T P	W T P	W T P	W T P	W T P	
3.2	Persentase SILPA			6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %	
3.3	Persentase SILPA terhadap APBD			6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %	
3.4	Persentase belanja pendidikan (20%)			30,9 6 %	30,9 6 %	30,96 %	30,96 %	30,96 %	30,96 %	30,9 6 %	30,9 6 %	
3.5	Persentase belanja kesehatan (10%)			10,0 3 %	10,0 3 %	10,03 %	10,03 %	10,03 %	10,03 %	10,0 3 %	10,0 3 %	
3.6	Bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa			6,55 %	6,55 %	6,55 %	6,55 %	6,55 %	6,55 %	6,55 %	6,55 %	
3.7	Penetapan APBD			T e p a t W a k t u	T e p a t W a k t u	T e p a t W a k t u	T e p a t W a k t u	T e p a t W a k t u	T e p a t W a k t u	T e p a t W a k t u	T e p a t W a k t u	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tetap melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) serta pemerintah kabupaten/kota khususnya dibidang peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya aparturnya yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lainnya. Teknologi saat ini telah memudahkan informasi dapat diakses dengan mudah

dan cepat oleh penggunaanya. Memudahkan pertukaran informasi melalui dunia maya.

Penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan *clean governance* telah menciptakan perubahan-perubahan penting dalam praktek pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perubahan tersebut diantaranya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan adanya perubahan tersebut, pemerintah daerah dituntut segera menyesuaikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan disegala bidang. Dalam bidang pengelolaan keuangan daerah telah terjadi perubahan sistem melalui perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan yang baru dalam rangka menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah akan berdampak pula pada sistem pertanggungjawaban dan pelaporan yang disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya diharapkan dapat tercapai target yaitu pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

- a. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk menggambarkan kewenangan dan pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dan sub bidang.
- b. Adanya perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur tentang sistem akuntansi pemerintah.
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan penataan aset milik Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan-bantuan kepada pihak ketiga/masyarakat yang belum tepat sasaran.
- e. Kurangnya kesadaran dari aparatur dalam memahami dan mengemban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Dampak dari kendala tersebut dapat menghambat/mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis yang telah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain :

- a. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
- b. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi dari hasil penyaluran bantuan keuangan kepada organisasi/lembaga/masyarakat apakah bantuan tersebut telah diterima dan digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang diusulkan.
- d. Mendorong percepatan penyerapan anggaran agar dapat berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan cara optimalisasi penggunaan anggaran.
- e. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- f. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah dengan pengembangan dan penggunaan program aplikasi yang tersedia.
- g. Peningkatan pelayanan publik dalam pencairan dana sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing.
- h. Mewujudkan ketersediaan data dan informasi dibidang pengelolaan keuangan daerah sebagai bahan pengambilan keputusan.
- i. Mengoptimalkan koordinasi penyusunan KUA, PPAS, APBD dan Perubahan APBD;
- j. Peningkatan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- k. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Tabel 2.3 sebagai berikut.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah

Nama SKPD : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				20.628.697.250,00						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov/13 Kab/1 Kota	Terlaksananya pengiriman surat menyurat	12 Kali	232.200.000,00						
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah rata-rata paket/dokumen/surat yang terkirim	12 Kali	2.200.000.000,00						
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5 Jenis	319.000.000,00						
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prov/13 Kab/1 Kota	Pembayaran honorarium PNS dan upah non PNS	12 Kali	8.182.224.250,00						
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis asuransi	2 Jenis	79.325.000,00						
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya	37 Unit	28.000.000,00						
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah rata-rata pembayaran upah petugas kebersihan kantor	12 Kali	598.488.000,00						
8	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	4 Jenis	322.000.000,00						
9	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UPTP PD yang membutuhkan ATK	15 Kantor	1.287.443.000,00						
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy	2 Jenis	1.568.409.300,00						
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UPTP PD yang membutuhkan komponen listrik	15 Kantor	974.807.700,00						
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Prov. Kalteng	Jumlah jenis peralatan /perlengkap	6 Jenis	1.453.800.000,00						

	Kantor		an kantor								
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov/1 3 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UPTP PD yang membutuhkan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 Kantor	100.000.000,00						
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Prov/1 3 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UPTP PD yang membutuhkan bahan bacaan surat kabar harian	15 Kantor	93.000.000,00						
15	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prov/1 3 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UPTP PD yang membutuhkan jamuan untuk rapat/tamu kantor	15 Kantor	165.000.000,00						
16	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prov/1 3 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UPTP PD yang membutuhkan perjalanan dinas luar daerah	15 Kantor	890.000.000,00						
17	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Prov/1 3 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UPTP PD yang membutuhkan perjalanan dinas dalam daerah	15 Kantor	2.100.000.000,00						
18	Rujukan Berobat PNS		Jumlah kantor/UPTP PD yang membutuhkan perjalanan dinas dalam/luar daerah untuk rujukan berobat	15 Kantor	35.000.000,00						
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				13.425.000.000,00						
1	Pembangunan Gedung Kantor	Prov/1 3 Kab/1 Kota	Jumlah pekerjaan pembangunan gedung kantor	9 Pekerjaan	1.500.000.000,00						
2	-	-	-	-	-						
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prov/1 3 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UPTP D yang membutuhkan	15 Kantor	450.000.000,00						
4	Pengadaan Mebeleur	Prov. Kalteng	Jumlah kantor yang membutuhkan pengadaan mebeleur	1 Kantor	1.000.000.000,00						
5	Pengadaan Pagar dan Tempat Parkir	Prov. Kalteng	Jumlah pekerjaan pembangunan pagar/parkir/cek fisik/halama	9 Pekerjaan	5.000.000.000,00						

			n								
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah rumah dinas yang dipelihara/di perbaiki	12 Unit	165.000.000,00						
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	15 Kantor	1.660.000.000,00						
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kendaraan dinas/operasional	3 Jenis	1.000.000.000,00						
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah mebeleur yang dipelihara	15 Kantor	50.000.000,00						
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah pagar, haman dan tempat parkir yang dipelihara	15 Kantor	500.000.000,00						
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kab. Seruyan	Tersedianya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	9 Bangunan	2.100.000.000,00						
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				210.000.000,00						
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Prov. Kalteng	Jumlah pakaian dinas	250 Stel	210.000.000,00						
2	-	-	-	-	-						
IV	PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS				60.000.000,00						
1	Pemindahan Tugas PNS	Prov. Kalteng	Jumlah PNS yang pindah tugas	12 Orang	60.000.000,00						
V	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				1.248.920.000,00						
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Prov. Kalteng	Jumlah jenis pendidikan/p elatihan formal yang diikuti	1 Jenis	150.000.000,00						
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prov. Kalteng	Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	160 Orang	600.000.000,00						
3	Bimbingan Teknis implementasi peraturan Perundang-Undangan/ Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Akuntansi Pemerintah	Prov. Kalteng	Jumlah peserta bimtek penyusunan laporan keuangan SKPD dan akuntansi pemerintah	350 Orang	300.000.000,00						
4	Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kalteng	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi implementasi peraturan	250 Orang	198.920.000,00						

			perundang-undangan								
5	-	-	-	-	-						
VI	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				1.886.395.243,00						
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	4 Dokumen	588.294.843,00						
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Prov. Kalteng	Jumlah laporan keuangan semesteran	7 Laporan	362.000.000,00						
3	-	-	-	-	-						
4	Penyusunan RKA SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen	180.000.000,00						
5	-	-	-	-	-						
6	-	-	-	-	-						
7	Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD	Prov. Kalteng	Terlaksananya rekonsiliasi laporan realisasi anggaran SKPD	46 SKPD	350.000.000,00						
8	Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Wilayah	Prov. Kalteng	Tersusunnya laporan keuangan unit akuntansi pengguna anggaran wilayah	7 SKPD	204.160.000,00						
9	Penyusunan Pelaporan Verifikasi Daerah	Prov. Kalteng	jumlah laporan verifikasi	1 Laporan	201.940.400,00						
10	-	-	-	-	-						
11	-	-	-	-	-						
12	-	-	-	-	-						
VII	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				8.213.594.331,00						
1	-	-	-	-	-						

2	Penyusunan Standar Satuan Harga	Prov. Kalteng	Jumlah buku standar satuan harga barang dan jasa	200 Buku	600.000.000,00						
3	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi	1 Pergub	253.097.281,00						
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Prov. Kalteng	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD	1 Perda	1.313.790.625,00						
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	Prov. Kalteng	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	1 Pergub	931.557.750,00						
6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Prov. Kalteng	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Perda	1.070.280.875,00						
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	Prov. Kalteng	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Pergub	463.346.000,00						
8	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Prov. Kalteng	Jumlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perda	473.686.000,00						
9	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Prov. Kalteng	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Pergub	417.841.000,00						
10	-	-	-	-	-						
11	-	-	-	-	-						
12	Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah SKPD yang terkoneksi jaringan SIMDA keuangan	46 SKPD	833.619.600,00						
13	Pengelolaan Kas Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah jenis laporan posisi kas daerah	3 Jenis	150.000.000,00						
14	Pengelolaan Gaji PNS	Prov. Kalteng	Terlaksananya pengelolaan gaji PNS Pemprov Kalteng	10800 PNS	468.536.400,00						
15	Evaluasi dan Koordinasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kalteng	Tersedianya data bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota	14 Kab/Kota	404.758.800,00						

16	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah SKPD yang mengikuti asistensi penyusunan laporan keuangan	46 SKPD	369.180.000,00						
17	Pengelolaan Administrasi Pajak	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi pajak	5600 Dokumen	83.900.000,00						
18	-	-	-	-	-						
19	Rapat Evaluasi Produk Hukum Pungutan Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen laporan kegiatan rapat evaluasi produk hukum pungutan daerah	4 Dokumen	50.000.000,00						
20	Rapat Rekon PKB BBNKB dan PAP	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen laporan kegiatan rapat rekon PKB BBNKB dan PAP	4 Dokumen	50.000.000,00						
21	Pembinaan Tertib Administrasi Pungutan Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen laporan kegiatan pembinaan tertib administrasi pungutan daerah	2 Dokumen	50.000.000,00						
22	Pembinaan dan Pengendalian UPTPPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen laporan kegiatan pembinaan dan pengendalian UPTPPD	2 Dokumen	100.000.000,00						
23	Rapat Evaluasi Hasil Pengendalian/Pemeriksaan	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen laporan kegiatan rapat evaluasi hasil pengendalian/pemeriksaan	4 Dokumen	50.000.000,00						
24	Survey/Pemantauan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen laporan kegiatan survey/pemantauan pelaksanaan pelayanan masyarakat	2 Dokumen	80.000.000,00						
25	-	-	-	-	-						
26	-	-	-	-	-						
27	-	-	-	-	-						
28	-	-	-	-	-						
29	-	-	-	-	-						
VIII	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA				1.714.945.750,00						

1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/kota	Prov. Kalteng	Jumlah Raperda dan Raperbup/R eperwali tentang APBD Kabupaten/ Kota yang dievaluasi	14 Raperda / Raperbup	400.000.000,00						
2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Prov. Kalteng	Jumlah Raperda dan Raperbup/R eperwali tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota yang dievaluasi	14 Raperda / Raperbup	330.000.000,00						
3	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah	Prov. Kalteng	Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah	300 orang	317.445.750,00						
4	Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Prov. Kalteng	Jumlah Raperda dan Raperbup/R eperwali tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota yang dievaluasi	14 Raperda / Raperbup	417.500.000,00						
5	Rapat Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Prov. Kalteng	Terlaksananya rapat kerja pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	14 Kab/ Kota	250.000.000,00						
6											
7											
X	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/KELURAHAN				290.000.000,00						
1	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan Keuangan	Kab/Kota	Terlaksananya monitoring bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan di kabupaten/kota	14 Kab/ Kota	290.000.000,00						
XI	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET/ BARANG DAERAH				5.967.504.000,00						
1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah laporan inventarisasi barang milik	20 Buku	611.250.000,00						

			daerah								
2	Pengamanan Aset Milik Daerah	Prov. Kalteng	Terjaganya aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	1.100.000.000,00						
3	Penyusunan RDKMBMD dan DKBMD	Prov. Kalteng	Kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi pengadaan barang dan pemeliharaan barang daerah	200 Buku	250.000.000,00						
4	Penghapusan Barang Tidak Bergerak	Prov. Kalteng	Data barang tidak bergerak yang akan dihapus	100 Buku	240.000.000,00						
5	Penilaian Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Ternilainya barang milik daerah	10 Buku	222.200.000,00						
6	Penghapusan Barang Bergerak	Prov. Kalteng	Data barang bergerak yang akan dihapus	100 Buku	240.000.000,00						
7	Rekonsiliasi Pencocokan Data Pengadaan Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Prov. Kalteng	Laporan pengadaan barang triwulan I,II,III, dan IV	10 Buku	144.000.000,00						
8	Penyusunan Laporan Akuntansi Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Neraca barang milik Pemprov. Kateng	10 Buku	116.000.000,00						
9	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)	Prov. Kalteng	Laporan inventaris barang	10 Buku	1.105.400.000,00						
10	Penyusunan Laporan Kegiatan Proyek Selesai dan Laporan Realisasi Pengadaan Barang	Prov. Kalteng	Buku laporan pelaksanaan seluruh kegiatan berdasarkan anggaran yang ada dalam DPA	10 Buku	100.000.000,00						
11	Pengelolaan Aset Daerah yang Dimanfaatkan	Prov. Kalteng	Meningkatnya penerimaan yang akan menambah PAD	5 Lokasi	1.300.000.000,00						
12	-	-	-	-	-						
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aset Yang Dimanfaatkan	Prov. Kalteng dan Luar Kalteng	Operasionalisasi aset daerah yang dimanfaatkan dapat berjalan secara optimal	15 Jenis	250.000.000,00						
14	Sistem Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Aset	Prov. Kalteng	Laporan pengawasan barang/aset	10 Buku	288.654.000,00						
15	-	-	-	-	-						
XII	PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				288.900.000,00						

1	Pembenahan Arsip	Prov. Kalteng	Tertatanya arsip dengan baik	12 Bulan	185.169.500,00						
2	Evaluasi LAKIP dan Penetapan Indikator Kerja Biro Keuangan	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen LAKIP Biro Keuangan	1 Dokumen	32.830.500,00						
3	Pelaporan Dana Transfer	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen pelaporan dana transfer per triwulan	4 Dokumen	70.900.000,00						
XIII	PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				327.529.426,00						
1	Peningkatan SDM Biro Keuangan	Prov. Kalteng	Jumlah PNS Biro Keuangan yang mengikuti diklat/bimtek /kursus/seminar	25 Orang	77.269.426,00						
2	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran Untuk Bendahara dan PPK SKPD	Prov. Kalteng	Terlaksananya bimtek pelaksanaan anggaran untuk bendahara dan PPK SKPD	200 Orang	250.260.000,00						
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				23.406.430.459	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				313.489.511	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renja SKPD	2 Dokumen	107.533.990	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	30.764.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perencanaan perubahan	1 Dokumen	7.000.000	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 Dokumen	29.974.500	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen rencana kerja, realisasi	2 Dokumen	14.805.600	

						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Laporan Evaluasi	2 Dokumen	118.411.421	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.160.681.514	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedia nya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	11.021.254.354	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 Dokumen	38.971.760	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan semesteran	1 Dokumen	36.583.600	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah rekonsiliasi laporan realisasi anggaran SKPD	1 Dokumen	63.871.800	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				803.811.796	
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah jenis asuransi	3 Jenis	358.018.495	
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah aset milik daerah yang dikelola	7 Lokasi	445.793.301	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.765.960	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek/seminar/kursus/lokakarya/workshop	7 Orang	5.765.960	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.701.121.559	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen listrik untuk bangunan kantor	13 Komponen	33.915.000	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis belanja peralatan/perlengkapan kantor	6 Jenis	837.208.099	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah lokasi yang membutuhkan peralat ankebersihan dan bahan pembersih	1 Lokasi	80.000.000	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Jenis Logistik	4 Jenis	76.499.850	

								yang disediakan			
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy	6 Jenis	67.619.750	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah jenis media cetak	2 Jenis	108.000.000	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah durasi keperluan makan dan minuman	12 Bulan	90.412.400	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Durasi keperluan untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	12 Bulan	249.567.852	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Jenis	157.898.608	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				831.821.080	
						Pengadaan Mebel		Jumlah jenis pengadaan Meubelair	4 Jenis	432.841.760	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Gedung	81.379.320	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis belanja perlengkapan gedung kantor	2 Jenis	317.600.000	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.235.802.127	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah paket jasa pengiriman surat-menyerurat	2 Jenis	35.000.000	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jenis Pembayaran yang dilakukan	4 Jenis	663.829.815	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5 Jenis	90.000.000	

						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terakomo dirnya gaji ASN PPPK/TEK ON BKAD Prov. Kalteng	12 Bula n	3.446.972.312	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.353.936.912	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinan danperbaik an	2 Jeni s	442.380.000	
						Pemeliharaan Mebel		Jangka pemelihara an Mebeleur	12 Bula n	8.000.000	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	5 Jeni s	62.780.000	
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah rehabilitasi rumah dinas jabatan	1 Loka si	231.070.350	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pekerjaan rehabilitasi sedang/ber atgedung kantor	8 Pek erja an	3.473.440.000	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah paket pekerjaan pagar, halaman dan tempat parkir	3 Pek erja an	136.266.562	
						PROGRAM PENGELOLA AN KEUANGAN DAERAH				1.010.843.027.487	
						Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				2.809.710.524	
						Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Laporan yang dikelola	2 Dok ume n	429.929.750	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Bahan Penyusuna n Perubahan APBD TA.2021	2 Dok ume n	130.326.288	
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala		Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabara n APBD	1 Rap erda /Rap ergu b	405.474.350	

						Daerah tentang Penjabaran APBD					
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Perda/ Perdub	401.361.700	
						Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah	1 Tahun	328.550.936	
						Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi		Jumlah rapat-rapat Koordinasi TAPD dalam rangka penyusunan kebijakan keuangan Daerah	1 Tahun	1.114.067.500	
						Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				264.141.207	
						Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota		Jumlah keputusan Gubernur tentang bagi hasilpajak provinsi kepada kabupaten/ kota	1 Peraturan	10.580.000	
						Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Raperda dan Raperbup/ Reperwali tentangAPBD Kabupaten /Kota yang dievaluasi	2 Peraturan	75.949.995	

						Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	2 Peraturana	66.040.060	
						Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	2 Peraturana	111.571.152	
						Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				765.449.790	
						Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah jenis laporan posisi kas daerah	4 Jenis	206.699.836	
						Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Laporan Administrasi	1 Jenis	167.620.416	
						Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Jumlah Jenis Laporan administrasi belanja langsung	1 Jenis	252.206.797	
						Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemetongan		Jumlah pengelolaan gaji PNS	12 Bulan	138.922.741	

						Atas SP2D dengan Instansi Terkait					
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1.182.947.177	
						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Provinsi		Tersusunnya Peraturan Daerah tentangPer tanggungja waban Pelaksana an APBD	2 Peratur an	279.810.677	
						Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggar aan Akuntansi Pemerintah Daerah		Jumlah aplikasi yang terkoneksi jaringan	1 Aplik asi	823.475.000	
						Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akutansi	1 Pera tura n	79.661.500	
						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				1.005.820.778.789	
						Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah monitoring bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan di Kabupaten /Kota Tersalurnya Bantuan Keuangan Kepada Pemerinta han Desa / Kelurahan	1 Tah un	7.601.852.005	
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Tersedianya Dana Darurat	1 Tah un	256.579.935.462	
						Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		Tersedianya Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Tah un	741.638.991.322	

						PROGRAM PENGELOLA AN BARANG MILIK DAERAH				1.626.973.585	
						Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.626.973.585	
						Penyusunan Standar Harga		Jumlah buku analisa standar belanja	20 buku	62.546.900	
						Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah buku RKBMD	20 buku	20.408.000	
						Penatausahaa n Barang Milik Daerah		Jumlah pengelolaa n aset milik Badan Keuangan dan Aset Daerah	14 Kab/ Kota	167.801.100	
						Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah laporan inventarisa si barang milik daerah	1 Jeni s	59.618.085	
						Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Jenis Pengaman an Aset Pemerinta h ProvinsiKal imantan Tengah	2 Jeni s	309.906.000	
						Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Aplikasi yang dikelola Laporan Inventaris barang Meningkat nya penerimaan yang akan menambah PAD	1 Aplik asi 1 Lap oran 100 %	738.453.500	
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtang anan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Data barang yang akan dihapus	2 Kate gori	197.169.000	
						Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Laporan pengadaan barang triwulan I, II, III, dan IV	4 Lap oran	57.389.000	
						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Buku laporan pelaksana an seluruh kegiatanbe rdasarkan anggaran yang ada dalam DPA SKPD Jumlah buku laporan neraca	1 Lap oran	13.682.000	

								barang milikPempr ov. Kalteng			
	JUMLAH				54.261.486.000,00					1.035.876.431.531,00	

2.4 Review terhadap RKPD

Sebagaimana diketahui bahwa dengan ditetapkannya dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021, maka **Visi Provinsi Kalimantan Tengah**, adalah :

**" KALTENG MAJU, MANDIRI DAN ADIL UNTUK KESEJAHTERAAN
SEGENAP MASYARAKAT MENUJU KALTENG BERKAH (BERMARTABAT,
ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH DAN HARMONIS) "**

Misi :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi.
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai.
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan.
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil, dan Anti Korupsi.
6. Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata.
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tujuan :

1. Meningkatkan kesesuaian tata ruang sesuai fungsinya.
2. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas.
3. Meningkatkan pembangunan daerah pesisir dan pantai.
4. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
8. Meningkatkan peran sektor pariwisata.
9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
10. Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan.

Sasaran :

1. Terwujudnya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten.
2. Meningkatnya konektivitas antar daerah.

3. Meningkatnya kesejahteraan nelayan.
4. Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat.
5. Meningkatnya daya beli masyarakat.
6. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi hijau.
7. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
8. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
9. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
10. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan.
11. Meningkatnya kualitas pendidikan.
12. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
13. Terpasarkannya destinasi wisata.
14. Menurunnya pencemaran lingkungan.
15. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah.

Dalam perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen RPJMD utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah.

RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ke Kelima dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Terkait hal tersebut, dengan mempedomani dokumen RPJMD, maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPJMD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2021.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sehingga Badan Keuangan dan Aset Daerah hanya melakukan tugas koordinatif sesuai dengan kewenangannya dibidang pengelolaan keuangan daerah yaitu membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota. Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2017 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan langsung dari masyarakat yang lebih bersifat teknis. Namun selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Badan Keuangan dan Aset Daerah mengakomodir usulan masyarakat berupa subsidi, hibah,

bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diusulkan baik dari organisasi, lembaga maupun kelompok masyarakat serta pemerintah desa.

Review terhadap RKPD Tahun 2023 terhadap hasil analisis kebutuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen Renja SKPD	2 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen perencanaan perubahan	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen rencana kerja, realisasi	2 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah Jenis Laporan Evaluasi	2 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kalteng	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen laporan semesteran	1 Dokumen	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Kalteng	Jumlah rekonsiliasi laporan realisasi anggaran SKPD	1 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah jenis asuransi	3 Jenis	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah aset milik daerah yang dikelola	7 Lokasi	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kalteng	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek/seminar/kursus/lokakarya/workshop	7 Orang	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Kalteng	Jumlah komponen listrik untuk bangunan kantor	13 Komponen	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kalteng	Jumlah jenis belanja peralatan/perlengkapan kantor	6 Jenis	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Kalteng	Jumlah lokasi yang membutuhkan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Lokasi	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Kalteng	Jumlah Jenis Logistik yang disediakan	4 Jenis	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Kalteng	Jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy	6 Jenis	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kalteng	Jumlah jenis media cetak	2 Jenis	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Kalteng	Jumlah durasi keperluan makan dan minuman	12 Bulan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kalteng	Durasi keperluan untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	12 Bulan	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Jenis	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Mebel	Prov. Kalteng	Jumlah jenis pengadaan Meubelair	4 Jenis	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Gedung	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah jenis belanja perlengkapan gedung kantor	2 Jenis	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kalteng	Jumlah paket jasa pengiriman surat-menyurat	2 Jenis	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kalteng	Jumlah Jenis Pembayaran yang dilakukan	4 Jenis	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kalteng	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5 Jenis	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kalteng	Terakomodirnya gaji ASN PPPK/TEKON BKAD Prov. Kalteng	12 Bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kalteng	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinan dan perbaikan	2 Jenis	
	Pemeliharaan Mebel	Prov. Kalteng	Jangka pemeliharaan Mebeleur	12 Bulan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	5 Jenis	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah rehabilitasi rumah dinas jabatan	1 Lokasi	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah pekerjaan rehabilitasi sedang/beratgedung kantor	8 Pekerjaan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah paket pekerjaan pagar, halaman dan tempat parkir	3 Pekerjaan	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Prov. Kalteng	Jumlah Laporan yang dikelola	2 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Prov. Kalteng	Jumlah Dokumen Bahan Penyusunan Perubahan APBD TA.2021	2 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Prov. Kalteng	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	1 Raperda/Rapergub	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Prov. Kalteng	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Perda/Pergub	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Prov. Kalteng	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah	1 Tahun	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Prov. Kalteng	Jumlah rapat-rapat Koordinasi TAPD dalam rangka penyusunan kebijakan keuangan Daerah	1 Tahun	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Prov. Kalteng	Jumlah keputusan Gubernur tentang bagi hasilpajak provinsi kepada kabupaten/kota	1 Peraturan	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Prov. Kalteng	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentangAPBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	2 Peraturan	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Prov. Kalteng	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentangPerubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	2 Peraturan	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Prov. Kalteng	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota yang dieval	2 Peraturan	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				

	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah jenis laporan posisi kas daerah	4 Jenis	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah Laporan Administrasi	1 Jenis	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Prov. Kalteng	Jumlah Jenis Laporan administrasi belanja langsung	1 Jenis	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Prov. Kalteng	Jumlah pengelolaan gaji PNS	12 Bulan	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	14Kab/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Peraturan	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	14Kab/Kota	Jumlah aplikasi yang terkoneksi jaringan	1 Aplikasi	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	14Kab/Kota	Jumlah Peraturan Gubernur tentang KebijakanAkutansi	1 Peraturan	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	14Kab/Kota	Jumlah monitoring bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan di Kabupaten/Kota Tersalurnya Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa / Kelurahan	1 Tahun	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	14Kab/Kota	Tersedianya Dana Darurat	1 Tahun	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	14Kab/Kota	Tersedianya Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Tahun	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
	Pengelolaan Barang Milik Daerah				
	Penyusunan Standar Harga	Prov. Kalteng	Jumlah buku analisa standar belanja	20 buku	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah buku RKBMD	20 buku	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah pengelolaan aset milik Badan Keuangandan Aset Daerah	14 Kab/Kota	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah	1 Jenis	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah Jenis Pengamanan Aset Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah	2 Jenis	

	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah Aplikasi yang dikelola Laporan Inventaris barang Meningkatnya penerimaan yang akan menambahPAD	1 Aplikasi 1 Laporan 100 %	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Data barang yang akan dihapus	2 Kategori	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Laporan pengadaan barang triwulan I, II, III, dan IV	4 Laporan	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Buku laporan pelaksanaan seluruh kegiatanberdasarkan anggaran yang ada dalam DPA SKPD Jumlah buku laporan neraca barang milikPemprov. Kalteng	1 Laporan	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah yang harus disinkronisasikan dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut :

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
 - a. Pengendalian Jumlah Penduduk;
 - b. Reformasi Pembangunan Kesehatan:
 - 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (*demand and supply*);
 - 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
 - c. Reformasi Pembangunan Pendidikan;
 - d. Sinergi Percepatan.
2. Bidang Ekonomi
 - a. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;
 - b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
 - c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
 - d. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;
 - e. Reformasi Keuangan Negara.
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - a. Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Bidang Sarana dan Prasarana
 - a. Peningkatan Ketahanan Air;
 - b. Penguatan Konektivitas Nasional:
 - 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah;
 - 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi;
 - 3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.
 - c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar:
 - 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional;

- 2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi;
- 3) Penataan Perumahan/Permukiman.
- 5. Bidang Politik
 - a. Konsolidasi Demokrasi.
- 6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
 - a. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI dengan
 - b. Pemberdayaan Industri Pertahanan;
 - c. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.
- 7. Bidang Hukum dan Aparatur
 - a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;
 - b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- 8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
 - a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
 - b. Pengelolaan Risiko Bencana;
 - c. Sinergi Pembangunan Perdesaan.
- 9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
 - a. Perkuatan Ketahanan Pangan;
 - b. Peningkatan Ketahanan Energi;
 - c. Percepatan Pembangunan Kelautan;
 - d. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup.

Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, dengan agenda pembangunan nasional sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita yaitu :

- 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- 2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- 8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun (n-1)	Target Tahun n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah	Jumlah lamanya waktu penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Tengah	WTP	WTP
2		Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah	80%	80%
3		Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan yang cepat tepat yang profesional sesuai SOP yang berlaku	Pesentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat	100%	100%
4		Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi	Persentase Aset dan BMD terinventarisasi dengan baik	100%	100%
			Persentase kesesuaian antara neraca keuangan dan aset		

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

a. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah yang profesional dan kredibel.
2. Memantapkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.
3. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
4. Memantapkan peran dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

b. Sasaran

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran yang dikaitkan dengan target kinerja Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya dan terlaksananya kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
2. Tersusunnya rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
3. Terlaksananya fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
4. Tersusunnya laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
5. Terlaksananya pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
6. Terselenggaranya administrasi kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
7. Terlaksananya pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Sehingga output Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah Program Tahunan yang sesuai dengan indikator kinerja program/kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah.

b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program awal yang diusulkan untuk dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah 3 (tiga) program yang didukung oleh 14 (empat belas) kegiatan dan 69 (enam puluh sembilan) Sub Kegiatan.

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah serta luar Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Provinsi dan melingkupi semua Kabupaten/Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Rencana kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Tengah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				23.406.430.459				25.747.073.505
5	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				313.489.511				344.838.462
5	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja SKPD	Prov. Kalteng	2 Dokumen	107.533.990	APBD		2 Dokumen	118.287.389
5	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	Prov. Kalteng	1 Dokumen	30.764.000	APBD		1 Dokumen	33.840.400
5	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perubahan	Prov. Kalteng	1 Dokumen	7.000.000	APBD		1 Dokumen	7.700.000
5	2	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Prov. Kalteng	1 Dokumen	29.974.500	APBD		1 Dokumen	32.971.950
5	2	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	Prov. Kalteng	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.500.000
5	2	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja, realisasi	Prov. Kalteng	2 Dokumen	14.805.600	APBD		2 Dokumen	16.286.160
5	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Evaluasi	Prov. Kalteng	2 Dokumen	118.411.421	APBD		2 Dokumen	130.252.563
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.160.681.514				12.276.749.665

5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kalteng	12 Bulan	11.021.254.354	APBD		12 Bulan	12.123.379.789
5	2	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	Prov. Kalteng	1 Dokumen	38.971.760	APBD		1 Dokumen	42.868.936
5	2	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan semesteran	Prov. Kalteng	1 Dokumen	36.583.600	382.44 9.800		1 Dokumen	40.241.960
5	2	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah rekonsiliasi laporan realisasi anggaran SKPD	Prov. Kalteng	1 Dokumen	63.871.800	APBD		1 Dokumen	70.258.980
5	2	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				803.811.796	APBD			884.192.976
5	2	1	1.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jenis asuransi	Prov. Kalteng	3 Jenis	358.018.495	APBD		3 Jenis	393.820.345
5	2	1	1.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah aset milik daerah yang dikelola	Prov. Kalteng	7 Lokasi	445.793.301	APBD		7 Lokasi	490.372.631
5	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.765.960				6.342.556
5	2	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek/seminar/kursus/lokakarya/workshop		7 Orang	5.765.960			7 Orang	6.342.556
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.701.121.559				1.871.233.715
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik untuk bangunan kantor	Prov. Kalteng	13 Komponen	33.915.000	APBD		13 Komponen	37.306.500
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis belanja peralatan/perlengkapan kantor	Prov. Kalteng	6 Jenis	837.208.099	APBD		6 Jenis	920.928.909
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah lokasi yang membutuhkan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Prov. Kalteng	1 Lokasi	80.000.000	APBD		1 Lokasi	88.000.000
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Logistik yang disediakan	Prov. Kalteng	4 Jenis	76.499.850			4 Jenis	

														84.149.835
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy	Prov. Kalteng	6 Jenis	67.619.750	APBD		6 Jenis	74.381.725	
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis media cetak	Prov. Kalteng	2 Jenis	108.000.000	APBD		2 Jenis	118.800.000	
5	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah durasi keperluan makan dan minuman		12 Bulan	90.412.400			12 Bulan	99.453.640	
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Durasi keperluan untuk Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi dalam daerah	Prov. Kalteng	12 Bulan	249.567.852	APBD		12 Bulan	274.524.637	
5	2	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem PemerintahanBerbasis Elektronik	Prov. Kalteng	3 Jenis	157.898.608	APBD		3 Jenis	173.688.469	
5	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				831.821.080				915.003.188	
5	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis pengadaan Meubelair	Prov. Kalteng	4 Jenis	432.841.760	APBD		4 Jenis	476.125.936	
5	2	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		2 Gedung	81.379.320			2 Gedung	89.517.252	
5	2	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis belanja perlengkapan gedung kantor	Prov. Kalteng	2 Jenis	317.600.000	APBD		2 Jenis	349.360.000	
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.235.802.127				4.659.382.340	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket jasa pengiriman surat-menyurat	Prov. Kalteng	2 Jenis	35.000.000	APBD		2 Jenis	38.500.000	
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Pembayaran yang dilakukan	Prov. Kalteng	4 Jenis	663.829.815	APBD		4 Jenis	730.212.797	

5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Prov. Kalteng	5 Jenis	90.000.000	APBD		5 Jenis	99.000.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terakomodirnya gaji ASN PPPK/TEKON BKAD Prov. Kalteng	Prov. Kalteng	12 Bulan	3.446.972.312	APBD		12 Bulan	3.791.669.543
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.353.936.912				4.789.330.603
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinan dan perbaikan	Prov. Kalteng	2 Jenis	442.380.000	APBD		2 Jenis	486.618.000
5	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jangka pemeliharaan Mebeleur	Prov. Kalteng	12 Bulan	8.000.000	APBD		12 Bulan	8.800.000
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	Prov. Kalteng	5 Jenis	62.780.000	APBD		5 Jenis	69.058.000
5	2	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah rehabilitasi rumah dinas jabatan		1 Lokasi	231.070.350			1 Lokasi	254.177.385
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pekerjaan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Prov. Kalteng	8 Pekerjaan	3.473.440.000	APBD		8 Pekerjaan	3.820.784.000
5	2	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pagar, halaman dan tempat parkir	Prov. Kalteng	3 Pekerjaan	136.266.562	APBD		3 Pekerjaan	149.893.218
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				1.010.843.027.487				1.111.927.330.236
5	2	2	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				2.809.710.524				3.090.681.576
5	2	2	1.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Laporan yang dikelola	Prov. Kalteng	2 Dokumen	429.929.750	APBD		2 Dokumen	472.922.725
5	2	2	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Bahan Penyusunan Perubahan APBD TA.2021	Prov. Kalteng	2 Dokumen	130.326.288	APBD		2 Dokumen	143.358.917

5	2	2	1.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	Prov. Kalteng	1 Raperda/Ra pergub	405.474.350	APBD		1 Raperda/Ra pergub	446.021.785
5	2	2	1.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	Prov. Kalteng	1 Perda/Pergub	401.361.700	APBD		1 Perda/Pergub	441.497.870
5	2	2	1.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah	Prov. Kalteng	1 Tahun	328.550.936	APBD		1 Tahun	361.406.030
5	2	2	1.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah rapat-rapat Koordinasi TAPD dalam rangka penyusunan kebijakan keuangan Daerah	Prov. Kalteng	1 Tahun	1.114.067.500	APBD		1 Tahun	1.225.474.250
5	2	2	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		Prov. Kalteng		264.141.207	APBD			290.555.328
5	2	2	1.02	1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah keputusan Gubernur tentang bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota	Prov. Kalteng	1 Peraturan	10.580.000	APBD		1 Peraturan	11.638.000
5	2	2	1.02	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Prov. Kalteng	2 Peraturan	75.949.995	APBD		2 Peraturan	83.544.995
5	2	2	1.02	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Prov. Kalteng	2 Peraturan	66.040.060	APBD		2 Peraturan	72.644.066

5	2	2	1.02	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dieval	Prov. Kalteng	2 Peraturan	111.571.152	APBD		2 Peraturan	122.728.267
5	2	2	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Prov. Kalteng		765.449.790	APBD			841.994.769
5	2	2	1.03	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah jenis laporan posisi kas daerah	Prov. Kalteng	4 Jenis	206.699.836	APBD		4 Jenis	227.369.820
5	2	2	1.03	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Administrasi	Prov. Kalteng	1 Jenis	167.620.416	APBD		1 Jenis	184.382.458
5	2	2	1.03	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Jenis Laporan administrasi belanja langsung	Prov. Kalteng	1 Jenis	252.206.797	APBD		1 Jenis	277.427.477
5	2	2	1.03	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah pengelolaan gaji PNS	Prov. Kalteng	12 Bulan	138.922.741	APBD		12 Bulan	152.815.015
5	2	2	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Prov. Kalteng		1.182.947.177	APBD			1.301.241.895

5	2	2	1.04	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		2 Peraturan	279.810.677			2 Peraturan	307.791.745
5	2	2	1.04	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi yang terkoneksi jaringan	Prov. Kalteng	1 Aplikasi	823.475.000	APBD		1 Aplikasi	905.822.500
5	2	2	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi	Prov. Kalteng	1 Peraturan	79.661.500	APBD		1 Peraturan	87.627.650
5	2	2	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Prov. Kalteng		1.005.820.778.789	APBD			1.106.402.856.668
5	2	2	1.05	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah monitoring bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan di Kabupaten/Kota Tersalurkanya Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa / Kelurahan	Prov. Kalteng	1 Tahun	7.601.852.005	APBD		1 Tahun	8.362.037.206
5	2	2	1.05	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Dana Darurat		1 Tahun	256.579.935.462			1 Tahun	282.237.929.008
5	2	2	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Tersedianya Dana Bagi Hasil Provinsi	Prov. Kalteng	1 Tahun	741.638.991.322	APBD		1 Tahun	815.802.890.454
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.626.973.585				1.789.670.944
5	2	3	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Prov. Kalteng		1.626.973.585	APBD			1.789.670.944
5	2	3	1.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah buku analisa standar belanja	Prov. Kalteng	20 buku	62.546.900	APBD		20 buku	68.801.590

5	2	3	1.01	3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah buku RKBMD	Prov. Kalteng	20 buku	20.408.000	APBD		20 buku	22.448.800
5	2	3	1.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengelolaan aset milik Badan Keuangandan Aset Daerah	Prov. Kalteng	14 Kab/Kota	167.801.100	APBD		14 Kab/Kota	184.581.210
5	2	3	1.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah	Prov. Kalteng	1 Jenis	59.618.085	APBD		1 Jenis	65.579.894
5	2	3	1.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Prov. Kalteng	2 Jenis	309.906.000	APBD		2 Jenis	340.896.600
5	2	3	1.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aplikasi yang dikelola Laporan Inventaris barang Meningkatnya penerimaan yang akan menambah PAD	Prov. Kalteng	1 Aplikasi 1 Laporan 100 %	738.453.500	APBD		1 Aplikasi 1 Laporan 100 %	812.298.850
5	2	3	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Data barang yang akan dihapus	Prov. Kalteng	2 Kategori	197.169.000	APBD		2 Kategori	216.885.900
5	2	3	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan pengadaan barang triwulan I, II, III, dan IV	Prov. Kalteng	4 Laporan	57.389.000	APBD		4 Laporan	63.127.900
5	2	3	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Buku laporan pelaksanaan seluruh kegiatan berdasarkan anggaran yang ada dalam DPA SKPD Jumlah buku laporan neraca barang milik Pemprov. Kalteng	Prov. Kalteng	1 Laporan	13.682.000	APBD		1 Laporan	15.050.200
					JUMLAH				1.035.876.431.531,00				1.139.464.074.684